

## Islamic Education in the New Order Period, Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan State Islamic University

Muhammad Ro'yi Alfadhili Nasution<sup>1\*</sup>, Kimlansyah Romadon Siregar<sup>2</sup>, Sehat Sultoni Dalimunthe<sup>3</sup>

Program Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

**Corresponding Author :** Muhammad Ro'yi Alfadhili Nasution

[Muhammadroyi1374@gmail.com](mailto:Muhammadroyi1374@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Education, Islam, the New Order Period

*Received :* 19, Mei

*Revised :* 21, June

*Accepted:* 23, July

©2023 Nasution, Siregar, Dalimunthe:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

Islamic education is a process of guidance to humans that includes the physical and spiritual based on religious (Islamic) teachings and dogmas in order to form the main personality according to Islamic rules in his life so that one day he will obtain happiness in the hereafter. During the New Order era, education was not the main goal. The New Order chose economic improvement and development as its main goal and pursued its policies through an administrative structure dominated by the military. This type of research uses the method of literature by using the theory of Islamic Theory of the New Order Period. It can be concluded that Islamic education in Indonesia in the New Order era experienced improvements and changes in a better direction compared to the colonial era and the early era of independence and the old order.

## Pendidikan Islam Masa Orde Baru Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Muhammad Ro'yi Alfadhili Nasution<sup>1\*</sup>, Kimlansyah Romadon Siregar<sup>2</sup>, Sehat Sultoni Dalimunthe<sup>3</sup>,

Program Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan

**Corresponding Author** : Muhammad Ro'yi Alfadhili Nasution

[Muhammadroyi1374@gmail.com](mailto:Muhammadroyi1374@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci*: Pendidikan, Islam, Masa Orde Baru

*Received* : 19, Mei

*Revised* : 21, June

*Accepted*: 23, July

©2023 Nasution, Siregar, Dalimunthe:

This is an open-access article distributed under the terms of the

[Creative Commons Atribusi 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

[Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Pendidikan Islam adalah proses bimbingan kepada manusia yang mencakup jasmani dan rohani yang berdasarkan pada ajaran dan dogma agama (Islam) agar terbentuk kepribadian yang utama menurut aturan Islam dalam kehidupannya sehingga kelak memperoleh kebahagiaan di akhirat. Pada masa Orde Baru, pendidikan bukan menjadi tujuan utama. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer. Jenis penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan menggunakan teori mengenai Teori Islam Masa Orde Baru. Dapat disimpulkan bahwa Bahwa pendidikan Islam di Indonesia pada era ore baru mengalami perbaikan dan perubahan ke arah yang lebih baik dibandingkan era penjajahan dan era awal kemerdekaan serta orde lama.

## PENDAHULUAN

Usaha untuk memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa terus dijalankan, walaupun dalam perjalanannya banyak masalah dan hambatan. Di antaranya timbul gerakan-gerakan yang tidak mempunyai loyalitas kepada pemerintah sehingga selalu berusaha menjegal usaha pemerintah meningkatkan mutu pendidikan nasional. Terdapat pula golongan yang membelokkan pandangan hidup bangsa Indonesia yang tertuang pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu PKI (Partai Komunis Indonesia). Walaupun dalam laju gerakannya terdapat pada politik akan tetapi dalam prakteknya menyusup pada bidang pendidikan. Dengan demikian, pendidikan di Indonesia mengalami beberapa kebijakan yang dianggap mempunyai beberapa kepentingan. Pada masa Orde Baru, pendidikan bukan menjadi tujuan utama. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer. Dalam pencapaian misi tersebut, disiplin ilmu ekonomi (termasuk alat analisis ekonomi makro dan mikro) menjadi ujung tombak, padahal di zaman Orde Lama ekonomi dianaktirikan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Umat Islam di Indonesia merupakan unsur mayoritas, bahkan di kancah internasional, komunitas muslim di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Dikarenakan sebagai umat mayoritas, umat Islam dirasa banyak memiliki kepentingan dalam berbagai aspek salah satunya adalah pendidikan. Berbagai kalangan juga sangat mengapresiasi kepentingan tersebut. Puncaknya, awal Orde Baru muncul ketegangan-ketengan politik antara umat Islam dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendorong lahirnya intensifikasi identitas keagamaan di sebagian umat Islam, di saat yang sama revivalisme Islam di Timur Tengah kala itu mempengaruhi semangat keberislaman di Indonesia. Tulisan ini berupaya mencermati kebijakan pendidikan Islam era Orde baru, di mana aspek pendidikan menjadi salah satu domain yang intens diperbincangkan di sana. Dalam konteks itu, secara umum di awal Orde Baru berkuasa sebenarnya hanya melanjutkan dan memperkuat kebijakan Orde Lama. Tahap ini madrasah belum dilihat sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, melainkan hanya lembaga pendidikan otonom di bawah pengawasan Menteri Agama

Lahirnya Orde baru dan di lanjutkan oleh zaman Reformasi dan tumpasnya PKI, Maka mulailah era baru dalam usaha meningkatkan pendidikan dan usaha menegakan cita-cita Pemuda-Pemudi Indonesia yang tercantum dalam proklamasi 17 agustus 1945. Ada banyak usaha yang membutuhkan kerja keras untuk mencapai pendidikan yang lebih baik, tapi dalam masa orde baru ini belum sepenuhnya sempurna kemudian pada zaman Selanjutnya yaitu zaman Reformasi lah mulai ada sedikit perbaikan contohnya yaitu kurikulum harus di tinjau dalam Lima (5) tahun sekali. Pendidikan yang baik dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik bagi bangsa itu sendiri, Tak terkecuali dengan visi dan misi guru yang bermutu dan professional juga nantinya akan di harapkan membawa anak didik yang juga baik.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Teori Islam Masa Orde Baru**

Islam pada masa Orde Baru adalah hubungan antara Islam dengan pemerintah Indonesia pada era kepemimpinan Soeharto. Islam pada masa Orde Baru berlangsung selama 32 tahun sesuai dengan periode Orde Baru, tepatnya sejak 1966 hingga 1998.

## **METODOLOGI**

Jenis penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. Metode kepustakaan merupakan metode yang mengumpulkan beberapa sumber yang dapat mendukung penelitian ini seperti buku, artikel, jurnal, informasi, dan lainnya.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Islam dan Orde Baru**

Sejak ditumpasnya peristiwa G30S/PKI pada tanggal 1 Oktober 1965, bangsa Indonesia telah memasuki fase baru yang di beri nama orde baru. Orde baru adalah:

- a) Sikap mental yang positif untuk menghentikan dan mengoreksi segala penyelewengan terhadap pancasila UUD 1945.
- b) Memperjuangkan adanya suatu masyarakat yang adil dan makmur baik materi maupun spritual melalui pembangunan.
- c) Sikap mental mengabdikan kepada kepentingan rakyat dalam melaksanakan pancasila dan UDD 1945 secara murni dan konsekuen.

Perubahan orde lama (sebelum 30 september 1965) menjadi orde baru melalui kerja sama antara pihak ABRI dan gerakan pemuda yang yang disebut angkatan 1966. Para pemuda tergabung dalam KAMI (kesatuan aksi mahasiswa) dan KAPPI (kesatuan aksi pemuda dan pelajar Indonesia), mereka mengadakan demonstrasi sebagai protes terhadap segala macam penyalahgunaan kekuasaan, harga yang meningkat, korupsi yang merajalela dan sebagainya. Setelah orde lama hancur, kepemimpinan Indonesia berada di tangan orde baru, tumbanganya orde lama yang umat Islam ikut berperan dalam menumbangkannya, memberikan harapan kepada kaum muslimin, namun kekecewaan baru pun muncul pada masa orde baru ini. umat Islam merasa, meskipun musuh utama yaitu kelompok komunis telah tumbang, kenyataannya berkembang tidak seperti yang diharapkan, rehabilitas masyumi, parti Islam berpengaruh yang dibubarkan Soekarno, tidak diperkenalkan. Baru setelah muncul suatu "generasi baru" yaitu kelompok mahasiswa yang tidak lagi mau menerima pandangan-pandangan rezim Orde Baru mulailah muncul sikap melawan. Para mahasiswa mendobrak rezim Orde Baru ini dengan memelopori suatu sikap politik yang merupakan ulangan dari sikap para perintis kemerdekaan, yaitu menentang segenap kesewenang-wenangan dan ketidakadilan.

Sejak dekade 1970-an, kegiatan Islam semakin berkembang bila dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya. Terlihat ada tanda-tanda kebangkitan Islam kembali dalam masa orde baru ini. Fenomena yang dapat dilihat adalah munculnya bangunan-bangunan baru Islam, mesjid-mesjid, mushala-mushala, madrasah-madrasah, dan pesantren-pesantren. Munculnya bangunan-bangunan mesjid yang megah itu diikuti pula dengan semakin ramainya jumlah jamaah sholat. Terutama dari kalangan angkatan muda. Pengajian-pengajian agama dan diskusi-diskusi keagamaan yang diadakan departemen-departemen, bahkan kegiatan kegiatan pengajian memasuki hotel-hotel mewah dan merekrut elite-elite bangsa. Tetapi disamping itu orde baru masih menyisihkan persoalan umat Islam yang belum terselesaikan, seperti peristiwa tanjung priok, problem masyarakat Aceh dan sebagainya.

#### **A. Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru**

Pada ketetapan MPR No. XXVII/MPRS/1966, disebutkan tentang dasar dan tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah membentuk manusia sejati, sebagaimana dinyatakan pada ketetapan tersebut: Bab I Pasal 1 berbunyi, Menetapkan bahwa Pendidikan Agama menjadi mata pelajaran disekolah dasar sampai universitas-universitas negeri. Bab II Pasal 2 berbunyi, dasar pendidikan adalah falsafah negara pancasila, Pasal 3 berbunyi, membentuk manusia pancasilais seperti berdasarkan ketentuan yang dikehendaki pembukaan undang-undang dasar 1945 dan UUD 1945. Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru Pada ketetapan MPR No. XXVII/MPRS/1966, disebutkan tentang dasar dan tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah membentuk manusia sejati, sebagaimana dinyatakan pada ketetapan tersebut: Bab I Pasal 1 berbunyi, Menetapkan bahwa Pendidikan Agama menjadi mata pelajaran disekolah dasar sampai universitas-universitas negeri. Bab II Pasal 2 berbunyi, dasar pendidikan adalah falsafah negara pancasila, Pasal 3 berbunyi, membentuk manusia pancasilais seperti berdasarkan ketentuan yang dikehendaki pembukaan undang-undang dasar 1945 dan UUD 1945. Dari sisi ideologi, pendidikan telah cukup mendapat tempat dari pendiri bangsa. Terbukti dengan dimasukkannya pendidikan sebagai salah satu prioritas utama dalam Pembukaan UUD 1945, yang notabene tidak dapat diubah dan dianggap sebagai landasan perjuangan bangsa yang sakral. Sebelum pemerintahan Presiden Suharto, masalah pendidikan nasional telah memperoleh cukup banyak perhatian dari elite politik yang ada. Jika kita melihat sejarah, proklamator Bung Hatta merupakan salah satu tokoh yang gencar menyuarakan pentingnya pendidikan nasional bagi kemajuan bangsa sejak zaman kolonialisme. Yang lebih menyedihkan dari kebijakan pemerintahan Orde Baru terhadap pendidikan adalah sistem doktrinisasi. Yaitu sebuah sistem yang memaksakan paham-paham pemerintahan Orde Baru agar mengakar pada benak anak-anak. Bahkan dari sejak Sekolah Dasar sampai pada tingkat Perguruan Tinggi diwajibkan untuk mengikuti penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang berisi tentang hapalan butir-butir Pancasila.

Proses indoktrinasi ini tidak hanya menanamkan paham-paham Orde Baru, tetapi juga sistem pendidikan masa Orde Baru yang menolak segala bentuk budaya asing, baik itu yang mempunyai nilai baik ataupun mempunyai nilai buruk. Dengan demikian, pendidikan pada masa Orde Baru bukan untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat, apalagi untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia, tetapi malah mengutamakan orientasi politik agar semua rakyat itu selalu patuh pada setiap kebijakan pemerintah. Putusan pemerintah adalah putusan yang adiluhung dan tidak boleh dilanggar. Itulah doktrin Orde Baru pada sistem pendidikan kita. Indoktrinasi pada masa kekuasaan Suharto ditanamkan dari jenjang Sekolah Dasar sampai pada tingkat pendidikan tinggi, pendidikan yang seharusnya mempunyai kebebasan dalam pemikiran. Pada masa itu, pendidikan diarahkan pada pengembangan militerisme yang militan sesuai dengan tuntutan kehidupan suasana perang dingin. Semua serba kaku dan berjalan dalam sistem yang otoriter.

Ahkirnya, kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru mengarah pada penyeragaman, baik cara berpakaian maupun dalam segi pemikiran. Hal ini menyebabkan generasi bangsa kita adalah generasi yang mandul. Maksudnya, miskin ide dan takut terkena sanksi dari pemerintah karena semua tindakan bisabisa dianggap subversif. Tindakan dan kebijakan pemerintah Orde Baru-lah yang paling benar. Semua wadah-wadah organisasi baik yang tunggal maupun yang majemuk dibentuk pada budaya homogen bahkan partai politik pun dibatasi. Hanya tiga partai yang berhak mengikuti Pemilu. Namun, pada waktu itu tidak ada yang berani bicara. Masa itu tidak ada lagi perbedaan pendapat sehingga melahirkan disiplin ilmu yang semu dan melahirkan generasi yang latah dan penakut. Pada masa pemerintahan Orde Baru pertumbuhan ekonomi tidak berakar pada ekonomi rakyat dan sumber daya domestik, melainkan bergantung pada utang luar negeri sehingga menghasilkan sistem pendidikan yang tidak peka terhadap daya saing dan tidak produktif. Pendidikan tidak mempunyai akuntabilitas sosial karena masyarakat tidak diikutsertakan dalam merancang sistem pendidikan karena semua serba terpusat. Dengan demikian, pendidikan pada masa itu mengingkari pluralisme masyarakat sehingga sikap teloransi semakin berkurang, yang ada adalah sikap egoisme.

Pada tahun 1975 keluar Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri, yang memperjelas status madrasah di Indonesia, isi surat keputusan bersama itu ialah :

1. Ijazah madrasah dinilai sama dengan ijazah sekolah setingkat.
2. Lulusan madrasah dapat melanjutkan sekolah ke sekolah umum ke tingkat lebih atas.
3. Siswa madrasah dapat pindah ke sekolah umum yang setingkat.

Kemudian pada tahun 1984 keluar Surat Keputusan Bersama SKB dua menteri antara Menteri Agama Noor 045/1984 dan Menteri P dan K no. 0299/1984, tentang pengaturan pembakuan kurikulum sekolah umum dan madrasah. Dalam SKB dua menteri tersebut, dinyatakan bahwa lulusan madrasah dapat dan boleh melanjutkan ke sekolah-sekolah umum yang lebih tinggi, sebagai follow up SKB ini lahir kurikulum 1984. Dalam kurikulum 1984 memuat hal strategis sebagai berikut :

- a. Program kegiatan kurikulum madrasah ( MI, MT, MA ) tahun 1984 dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler baik dalam program ini maupun pilihan.
- b. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara cara seseorang belajar dan apa yang dipelajarinya.
- c. Penilaian dilakukan secara berkesinambungan dan menyeluruh untuk keperluan meningkatkan proses dan hasil belajar serta program.

## **B. Kebijakan Politik Pendidikan Islam Masa Orde Baru**

Orde baru adalah masa pemerintahan di Indonesia sejak 11 maret 1966 hingga terjadinya peralihan kepresidenan, dari presiden soeharto ke peresiden habibi pada 21 mei 1998. Peralihan dari orde lama ke orde baru membawa konsekuensi perubahan strategi politik dan kebijakan pendidikan nasional. Pada dasarnya orde baru adalah suatu korelasi total terhadap orde lama yang didominasi PKI dan dianggap telah menyelewengkan pancasila. Masa orde baru disebut juga sebagai orde konstitusional dan orde pembangunan. Yakni bertujuan membangun manusia seutuhnya dan menyeimbangkan antara rohani dan jasmani untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Pada 1973-1978 dan 1983 dalam sidang MPR yang kemudia menyusul GBHN. Dalam dekade 1970-an madrasah terus dikembangkan untuk memperkuat keberadaanya, namun di awal-awal tahun 1970-an, justru kebijakan pemerintah terkesan berupaya untuk mengisolasi madrasah dari bagian sistem pendidikan nasional. Hal ini terlihat dari langkah yang ditempuh pemerintah dengan mengeluarkan suatu kebijakan berupa keputusan presiden no 34 tanggal 18 april tahun 1972 tentang tanggung jawab fungsional pendidikan dan latihan. Isi keputusan ini mencakup tiga hal:

1. Menteri pendidikan dan kebudayaan bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan umum dan kebijakan.
2. Menteri tenaga kerja bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan dan latihan dan keahlian dan kejujuran tenaga kerja akan pegawai negeri.
3. Ketua lembaga administrasi negara bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dan latihan khusus untuk pegawai negeri.

Dari penjelasan dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam di Indonesia pada era ore baru mengalami perbaikan dan perubahan ke arah yang lebih baik dibandingkan era penjajahan dan era awal kemerdekaan serta orde lama. Hanya saja, masih ada nuansa diskriminasi dan dikotomisasi antara pendidikan Islam dengan pendidikan umum yang berimplikasi pada input, proses dan output pendidikan Islam yang masa itu memengaruhi pula pada kebijakan politik pendidikan Islam pada masa berikutnya.

### **C. Dikotomi Pendidikan Islam Masa Orde Baru**

Orde baru adalah masa pemerintahan di Indonesia sejak 11 maret 1966 hingga terjadinya peralihan kepresidenan, dari presiden soeharto ke peresiden habibi pada 21 mei 1998. Peralihan dari orde lama ke orde baru membawa konsekuensi perubahan strategi politik dan kebijakan pendidikan nasional. Pada dasarnya orde baru adalah suatu korelasi total terhadap orde lama yang didominasi PKI dan dianggap telah menyelewengkan pancasila. Masa orde baru disebut juga sebagai orde konstitusional dan orde pembangunan. Yakni bertujuan membangun manusia seutuhnya dan menyeimbangkan antara rohani dan jasmani untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Pada 1973–1978 dan 1983 dalam sidang MPR yang kemudia menyusul GBHN. Dalam dekade 1970–an madrasah terus dikembangkan untuk memperkuat keberadaanya, namun di awal-awal tahun 1970–an, justru kebijakan pemerintah terkesan berupaya untuk mengisolasi madrasah dari bagian sistem pendidikan nasional. Hal ini terlihat dari langkah yang ditempuh pemerintah dengan mengeluarkan suatu kebijakan berupa keputusan presiden no 34 tanggal 18 april tahun 1972 tentang tanggung jawab fungsional pendidikan dan latihan. Isi keputusan ini mencakup tiga hal :

- a. Menteri pendidikan dan kebudayaan bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan umum dan kebijakan.
- b. Menteri tenaga kerja bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan dan latihan dan keahlian dan kejujuran tenaga kerja akan pegawai negeri.
- c. Ketua lembaga administrasi negara bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dan latihan khusus untuk pegawai negeri.

8 Dari penjelasan dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam di Indonesia pada era ore baru mengalami perbaikan dan perubahan ke arah yang lebih baik dibandingkan era penjajahan dan era awal kemerdekaan serta orde lama. Hanya saja, masih ada nuansa diskriminasi dan dikotomisasi antara pendidikan Islam dengan pendidikan umum yang berimplikasi pada input, proses dan output pendidikan Islam yang masa itu memengaruhi pula pada kebijakan politik pendidikan Islam pada masa berikutnya.

### **D. Kesuksesan Pendidikan Islam Masa Orde Baru**

Masa Orde Baru ini mencatat banyak keberhasilan, di antaranya adalah:

- a. Pemerintah memberlakukan pendidikan agama dari tingkat SD hingga universitas (TAP MPRS No.XXVII/MPRS/1966).
- b. Madrasah mendapat perlakuan dan status yang sejajar dengan sekolah umum.
- c. Pesantren mendapat perhatian melalui subsidi dan pembinaan.
- d. Berdirinya MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada tahun 1975.
- e. Pelarangan SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah) mulai tahun 1993 setelah berjalan sejak awal tahun 1980-an.
- f. Pemerintah memberi izin pada pelajar Muslimah untuk memakai rok panjang dan busana jilbab di sekolah-sekolah negeri sebagai ganti seragam sekolah yang biasanya rok pendek dan kepala terbuka.
- g. Terbentuknya UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- h. Terbentuknya UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.

- i. Adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- j. Dukungan pemerintah terhadap pendirian Bank Islam, Bank Muamalat Islam.
- k. Pendirian BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan Sadaqoh).
- l. Pemberlakuan label halal atau haram oleh MUI bagi produk makanan dan minuman pada kemasannya, terutama bagi jenis olahan.
- m. Pemerintah memfasilitasi penyebaran da'i ke daerah terpencil dan lahan transmigrasi.
- n. Mengadakan MTQ (Musabaqoh Tilawatil Qur'an).
- o. Mengadakan peringatan hari besar Islam di Masjid Istiqlal.
- p. Mencetak dan mengedarkan mushaf Al-Quran dan buku-buku Agama Islam yang kemudian diberikan ke mesjid atau perpustakaan Islam.
- q. Terpusatnya jama'ah haji di asrama haji.
- r. Penayangan pelajaran Bahasa Arab di TVRI.
- s. Berdirinya MAN PK (Program Khusus).
- t. Mengadakan pendidikan pascasarjana untuk Dosen IAIN baik ke dalam maupun luar negeri.

Khusus mengenai kebijakan ini, Departemen Agama telah membuka program pascasarjana IAIN sejak 1983 dan join cooperation dengan negara-negara Barat untuk studi lanjut jenjang Magister maupun Doktor.

#### **E. Peranan Politik Golkar Masa Orde Baru**

Era keperesidenan pak Soeharto, Harmoko merupakan orang yang sangat dekat kepada beliau. Pada masa ini banyak sekali kebijakan yang kontroversi jauh dari namanya demokratis. Harmoko merupakan pimpinan dari Golkar (golongan karya) pada masa orde baru. Berbagai keputusan harmoko dalam hal politik banyak sekali menimbulkan pro-kontra. Tokoh yang ikut serta menentukan arah politik masa orde baru akan kebijakan yang sering pro-kontra yang jauh dari kata demokratis ikut mendukung mencalonkan kembali Soeharto sebagai presiden 7 periode dan kemempinan harmoko pada masa orde baru juga terbilang amat cukup lama.

Dukungan terhadap nasib rakyat kecil dilakukan oleh para mahasiswa dari berbagai daerah, seperti di Jakarta, mahasiswa UI (Universitas Indonesia) berhasil menerobos masuk kedalam Sidang Umum MPR untuk mendengar pertanggungjawaban Presiden Soeharto, merumuskan GBHN (Garis garis Besar Haluan Negara), serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. Di kampus UGM (Universitas Gadjah Mada) Yogyakarta digelar aksi keprihatinan, yang melibatkan belasan ribu mahasiswa dan dosen untuk menuntut ketersediaan bahan pokok, mempersoalkan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), serta pertanggungjawaban Presiden Soeharto di hadapan MPR.<sup>10</sup> Terpilihnya Soeharto kembali sebagai presiden menimbulkan kekecewaan bagi rakyat. Kebijakan yang tidak demokratis pada masa orde baru membuat rakyat semakin ingin melengserkan Soeharto sehingga mahasiswa terus melakukan unjuk rasa menuntut reformasi. Tuntutan mahasiswa adalah menyelesaikan seluruh krisis nasional dengan cepat, serta menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Peta politik Islam di Indonesia senantiasa diwarnai oleh peta perpolitikan pemerintah. Dari sejak zaman pra-kemerdekaan, pasca kemerdekaan (orde lama), orde baru dan era reformasi. Pendidikan Islam masih berada dalam posisi yang secara umum belum berpihak pada pemberdayaan umat. Pendidikan lebih merupakan alat untuk mana pemerintah menggunakannya untuk mengiring rakyat dan umat kepada tujuan politik yang diinginkan secara teoritis tidaklah salah jika pemerintah menginginkan agar produk lulusan lembaga pendidikan memberikan kontribusi bagi pembangunan. Namun pada saat yang sama seharusnya pemerintah juga memberikan kebebasan kepada dunia pendidikan untuk menentukan arahnya dengan tetap memperoleh bantuan, dukungan dan fasilitas dari pemerintah. Bahwa pendidikan Islam di Indonesia pada era ore baru mengalami perbaikan dan perubahan ke arah yang lebih baik dibandingkan era penjajahan dan era awal kemerdekaan serta orde lama. Hanya saja, masih ada nuansa diskriminasi dan dikotomisasi antara pendidikan Islam dengan pendidikan umum yang berimplikasi pada input, proses dan output pendidikan Islam yang masa itu memengaruhi pula pada kebijakan politik pendidikan Islam pada masa berikutnya.

## **PENELITIAN LANJUTAN**

Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan teori yang sama dengan periode masa reformasi dan masa kini sehingga didapatkan bagaimana perkembangan pendidikan islam di setiap periodenya dan diketahui bagaimana perbedaan ditiap masanya.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Dengan terlasanaknya penenlitian ini dan dimuat dalam jurnal maka saya selaku Peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Sehat Sultoni Dalimunthe, M.A Selaku dosen pembimbing dalam membuat hasil karya tulisan ini;
2. Sudara Muhammad Ro'yi Alfadhili Nasution;
3. Saudara Kimlansyah Romadon Siregar.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alam Lukis, " Kontestasi Kebijakan Pendidikan Islam di Era Orde Baru dan Reformasi", *Islamic Education Journal*, Vol. 3. No. 2, Oktober 2020.
- Anwar Saiful, Marlina, " Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia Zaman Orde baru dan Reformasi", *Jurnal Pendidikan Islam Al - I'tibar*, Vol. 6. No. 2, Agustus, 2019.
- Jailani Syahrani, "Kilas Balik Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Orde Baru", *Jurnal Inovatio*, Vol XIX, No 1, Januari, 2019.
- Mahfud Choirul, *Politik Pendidikan Islam*, ( Yohyakarta : Pustaka Pelajar, 2016).
- Zuhimma, *Sejarah Pendidikan Islam Analisis Kebijakan Pendidikan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2021).